

## ABSTRAK

Kuras Purba (02659220003)

### **ASET BUMN SEBAGAI JAMINAN ATAS PINJAMAN PEMERINTAH INDONESIA KEPADA LEMBAGA KEUANGAN ASING**

(87 halaman: 0 gambar; 0 tabel; 0 lampiran)

Penelitian ini membahas tentang BUMN sebagai badan hukum yang didirikan oleh negara untuk mengelola potensi kekayaan alam dan cabang-cabang usaha strategis yang tidak dikuasai oleh pihak swasta dengan tujuan utama mengejar keuntungan dalam hal modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN. BUMN sebagai badan hukum memiliki harta kekayaan karena BUMN merupakan subyek hukum baik untuk hukum perdata maupun pidana sehingga mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia alamiah adanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan Undang-Undang yang tepat dijadikan sebagai landasan yuridis pengaturan kekayaan BUMN/Aset Negara serta apakah Aset BUMN memiliki legitimasi dijadikan sebagai Jaminan pemberian penjaminan Lembaga Keuangan Asing. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan masalah menggunakan Conceptual approach, Statute approach, dan Case approach. Bahan atau sumber hukum yang digunakan adalah UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, KUHP, UU No. 16 Tahun 2004 tentang BUMN, UU Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Negara Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Kata Kunci: Aset BUMN, Kekayaan Negara dipisahkan, Kolateral, Pinjaman Pemerintah

Referensi: 8 (1994 –2015)

## ABSTRACT

*Kuras Purba (02659220003)*

**THE STATE-OWNED ENTERPRISES ASSETS AS COLLATERAL FOR  
GOVERNMENT LOANS TO FOREIGN FINANCIAL INSTITUTIONS**

*(87 pages: 0 images; 0 tables; 0 attachments)*

*This study discusses the State-Owned Enterprises (BUMN) as a legal entity established by the state to manage natural resources and strategic business branches not controlled by private individuals with the main goal of pursuing profits from state assets separated from the State Budget. As a legal entity, BUMN has assets because BUMN is a legal subject in both civil and criminal law, thereby having rights and obligations like any other natural person. The purpose of this research is to know the legal basis for regulating BUMN/State Assets and whether BUMN assets have legitimacy as collateral for foreign debt guarantees. This research uses a normative legal approach with a problem-solving approach using Conceptual approach, Statute approach, and Case approach. The legal materials used are the 1945 Indonesian Constitution, the Criminal Code, Law No. 16 of 2004 on BUMN, Law No. 1 of 2004 on State Treasury, and Law No. 17 of 2003 on State Finance."*

**Keywords:** *State-owned assets, separation of state wealth, collateral, government loans.*

Reference: 8 (1994 –2015)